

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

Dalam sejarahnya, Indonesia kaya akan berbagai macam budaya dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan budaya tersebut merupakan suatu aset yang tidak ternilai harganya. Keberagaman akan budaya itu terlihat dari karya seni seperti bentuk bangunan yang berbeda yang mana mempunyai keunikan serta sejarahnya tersendiri. Indonesia yang mempunyai penduduk mayoritas muslim, dimana unsur – unsur islam telah banyak mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh budaya, adat istiadat, agama lain serta teknologi. Pengaruh tersebut terlihat dari bentuk bangunan rumah ibadah yaitu masjid. Dimana ciri khas dari umat muslim yang telah menghuni suatu daerah terdapat bangunan masjid (Supriyanti *et al.*, 2022).

Di beberapa daerah di Indonesia masjid memiliki banyak sebutan yang beraneka ragam sesuai dengan Bahasa dari setiap daerah. Fungsi masjid dalam sejarah kemunculannya, bukan hanya sekedar sebagai tempat sujud, tetapi mempunyai fungsi ganda yaitu bermuamalah. Pada masa Rasulullah Saw, masjid berfungsi sebagai sentra kegiatan-kegiatan pendidikan, yakni tempat pembinaan dan pembentukan karakter umat (Rumondor, 2019).

Masjid yang berada di wilayah DKI Jakarta tidak hanya digunakan untuk tempat peribadatan semata, tetapi juga menjadi pusat budaya yang memiliki hubungan dengan komunitas lain (Kurd, 2018). Hal ini menjadi bukti dengan adanya gaya bangunan yang unik dengan kombinasi beberapa perpaduan unsur etnis atau budaya. Di wilayah indonesia khususnya Ibukota DKI Jakarta masih terdapat beberapa masjid – masjid kuno yang merupakan bukti bahwa adanya perjuangan rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Seiring berjalannya waktu, bangunan masjid di indonesia mengalami perubahan dari bentuk awal masjid dibangun. Adapun beberapa penyebab terjadinya perubahan bentuk masjid di antaranya : waktu, adat istiadat, budaya. Sehingga

melahirkan bentuk masjid yang beragam dan berciri khas serta tersebar di seluruh indonesia (Supriyanti *et al.*, 2022).

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Safitri *et al.*, (2021) pengertian akuntansi yaitu sebuah sistem untuk mengumpulkan dan memproses, melakukan analisis, mengukur serta mencatat semua data ataupun transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan di mana hasil proses tersebut akan dilaporkan kepada pengambil keputusan.

Akuntansi menurut Sumarsan (2017:1) akuntansi merupakan suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat transaksi serta kejadian yang berkaitan dengan keuangan agar menghasilkan informasi keuangan yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntansi merupakan suatu sistem yang menyediakan informasi mengenai laporan tentang kegiatan ekonomi atau keuangan serta kondisi ataupun keadaan suatu perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Sistem tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan memproses data-data yang berkaitan serta menyebarkan informasi keuangan kepada pihak yang terkait. Akuntansi memiliki arti “bahasa bisnis” (*language of business*) karena melalui akuntansi informasi bisnis dapat diberikan kepada para pemangku kepentingan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengolah transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh organisasi atau perusahaan sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan dalam melakukan pengambilan keputusan.

2.1.1.2 Akuntansi Sektor Publik

Seiring waktu berjalan akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat cepat dan pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap

praktik akuntansi yang dilakukan baik oleh lembaga-lembaga sektor pemerintah, perusahaan milik negara maupun daerah, serta berbagai organisasi publik lainnya. Jika dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Dengan adanya tuntutan yang besar dari masyarakat yang menginginkan akan adanya transparansi dan akuntabilitas publik yang diterapkan atau dilakukan oleh lembaga-lembaga sektor publik.

Organisasi sektor publik tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, dimana dalam memperhitungkan biaya ekonomi serta sosial dan juga dampak negatif atas kegiatan yang akan serta telah dilakukan. Berbagai tuntutan itu menyebabkan akuntansi dapat dengan mudah diterima dan diakui sebagai ilmu yang sangat dibutuhkan dalam mengelola urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik merupakan kegiatan yang awalnya paling spesial dari suatu profesi yang relatif kecil. Tetapi, untuk saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk dapat menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial keberadaanya dalam kegiatan ekonomi (Mardiasmo, 2018).

2.1.1.3 Sifat Dan Karakteristik Akutansi sektor publik

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang mempunyai tujuan. Tujuan akuntansi sangat terstruktur yaitu untuk mencapai hasil tertentu, dimana hasil tersebut diharapkan dapat memiliki banyak manfaat. Akuntansi selalu digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik. Akuntansi sektor publik sangat berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari sifat dan karakteristik akuntansi tersebut. Dimana hal tersebut dapat menyebabkan adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya.

Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks. Dimana komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi ekonomi, politik, kultur, demografi (Mardiasmo, 2018).

A. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain :

- Pertumbuhan ekonomi

- Tingkat inflasi
- Pertumbuhan pendapatan per kapital (GNP/GDP)
- Dll.

B. Faktor politik

Faktor politik yang mempengaruhi sektor publik antara lain :

- Hubungan negara dan masyarakat
- Legitimasi pemerintah
- Tipe rezim yang berkuasa
- Dll .

C. Faktor kultural

Faktor kultural yang mempengaruhi sektor publik antara lain :

- Keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya
- Sistem nilai di masyarakat
- Historis
- Sosiologi masyarakat
- Dll.

D. Faktor demografi

Faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain :

- Pertumbuhan penduduk
- Struktur usia penduduk
- Migrasi
- Tingkat kesehatan.

2.1.1.4 Siklus Akuntansi

Siklus Akuntansi Merupakan tahapan-tahapan laporan keuangan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan laporan posisi keuangan. Siklus akuntansi merupakan urutan kerja yang harus dilakukan sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan. Maka, dapat disimpulkan bahwa siklus akuntansi merupakan proses atau tahapan dimana dilakukan penyusunan laporan keuangan dimulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan.

Tahapan-tahapan siklus akuntansi sebagai berikut:

- Identifikasi transaksi.
- Pencatatan transaksi ke dalam jurnal.
- Posting buku besar.
- Dilanjutkan dengan menyusun neraca saldo serta jurnal penyesuaian.
- Dan terakhir penyusunan neraca saldo penyesuaian serta laporan keuangan (Safitri *et al.*, 2021).

2.1.2 Pengertian Masjid

Masjid merupakan unsur yang paling penting dalam struktur masyarakat muslim. Selain itu, masjid mempunyai makna yang besar dalam kehidupan umat muslim, baik makna fisik ataupun makna spiritual. Masjid berasal dari kata sajada - yasjudu yang berarti merendahkan diri, menyembah atau bersujud, kata masjid di ambil dari kata bahasa arab sajada- yasjudu- sujudaa yang artinya meletakkan di atas bumi (bersujud) (Umar, 2019 : 13).

Pada zaman Rasulullah SAW masjid tidak hanya digunakan untuk pengajaran agama islam tetapi masjid juga digunakan untuk berpolitik serta menyusun strategi peperangan. Menurut Dewan Masjid Indonesia (DMI) terdapat tiga fungsi Masjid, yaitu :

Pertama, Masjid sebagai ibadah (*mdlahah*) juga merupakan tempat ibadah secara luas (*ghairu madhlah*) selama dilakukan dalam batas-batas syariat.

Kedua, Masjid sebagai wadah pengembangan masyarakat melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki Masjid yang bersangkutan.

Ketiga, Masjid sebagai pusat komunikasi dan persatuan umat. Masjid merupakan organisasi nonlaba dalam bidang keagamaan.

Pada organisasi nonlaba cenderung tidak ada suatu kepemilikan mutlak, karena organisasi nonlaba didirikan oleh beberapa orang ataupun kelompok. Di mana modal untuk mendirikannya bisa di dapatkan melalui hutang. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan operasional atau menunjang kegiatan-kegiatan nya biasa di dapatkan dari pendapatan atau jasa yang di berikan. Tetapi hal tersebut berakibat adanya pengukuran jumlah serta kepastian arus kas masuk sebagai ukuran penting bagi para pemakai dari laporan keuangan masjid tersebut (Ula *et al.*, 2021).

2.1.2.1 Struktur Organisasi Masjid

Ketua dan pengurus bertugas memimpin organisasi dalam melaksanakan program atau rencana kerja , baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat khusus. Di dalam kegiatan rutin itu, misalnya saja, tercakup apa-apa saja yang dapat dilakukan didalam masjid. Kegiatan pemugaran atau perbaikan bangunan misalnya, tergolong kedalam program khusus.

1. Struktur Organisasi Masjid

Struktur organisasi merupakan bagan yang menunjukkan proses hirarki hubungan antar pengurus dalam pengelola dan mengendalikan sebuah lembaga (Iskandar, 2019 : 33).

Struktur organisasi masjid dapat dikembangkan sesuai dengan program dan tujuan dari sebuah masjid yang mungkin berbeda antara mesid yang satu dengan masjid lainnya tergantung mekanisme kerja organisasi tersebut.

2.1.2.2 Laporan Keuangan Masjid

Suatu lembaga/organisasi/perusahaan dalam menjalankan bisnisnya akan mencatat transaksi keuangan secara sistematis. Pencatatan yang dilakukan akan menghasilkan suatu laporan keuangan. Dimana laporan ini dapat dibuat setiap saat,

dimana pihak-pihak yang terkait menginginkannya, dapat dibuat dalam bulanan, triwulan, semesteran dan satu tahun atau satu periode akuntansi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi. Dimana dalam akuntansi kegiatan pencatatan dan penggolongan merupakan suatu proses yang dilakukan secara rutin serta berulang – ulang setiap kali adanya transaksi keuangan. Sedangkan kegiatan pelaporan dan penganalisisan biasanya hanya dilakukan pada waktu tertentu sehingga dapat ditentukan sesuai dengan kebijakan perusahaan/lembaga/perusahaan.

Kegiatan pencatatan dan penggolongan yang bersifat rutin dapat dilakukan dengan manual seperti yang sering dijumpai pada masjid-masjid kecil atau yang sudah tua, dan ada pula yang dikerjakan dengan mesin-mesin otomatis seperti dijumpai pada masjid - masjid besar atau yang sudah berkembang. Perkembangan teknologi yang pesat akhir-akhir ini menunjukkan bahwa penggunaan mesin-mesin dalam melakukan pembukuan sangat banyak di pakai dimana saja, bahkan di masjid sudah banyak komputer tersedia untuk mengelola data akuntansi, kehadiran komputer banyak digunakan baik dalam masjid besar maupun menengah.

Dalam menentukan metode pencatatan akuntansi mana yang akan digunakan dalam suatu organisasi, apakah metode tulis tangan, mekanik atau elektronik tergantung pada berbagai faktor. Hal-hal penting yang harus dipertimbangkan antara lain adalah besarnya organisasi, jumlah data yang harus diproses, dan jumlah biaya yang harus dikeluarkan dalam pemakaian setiap metode tersebut. Masjid kecil mungkin akan menganggap biaya pemakaian komputer elektronik terlalu mahal, sebaliknya dalam masjid besar penggunaan metode tulis tangan dipandang tidak mampu memenuhi kebutuhan informasi yang cepat dan sangat banyak jumlahnya. Namun demikian tanpa memandang metode pencatatan akuntansi mana yang digunakan, semua metode tersebut sama-sama membutuhkan adanya konsep-konsep dasar akuntansi (Alqodri, 2017:121-122).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan masjid merupakan sebuah catatan tentang informasi keuangan masjid pada suatu periode akuntansi yang bisa digunakan untuk menggambarkan kinerja masjid tersebut, serta memiliki fungsi untuk menilai bagaimana kondisi usaha atau keadaan keuangan masjid, sebagai bahan evaluasi serta bentuk pertanggung jawaban masjid kepada donator dan masyarakat.

2.1.2.3 Macam – macam Masjid

Macam – macam Masjid menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 394 tahun 2004 dan Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Islam No. DJ.II/802 Tahun 2014, antara lain :

1. Masjid Raya

Berdasarkan Keputusan *Menteri Agama (KMA) no. 394 tahun 2004* menerangkan, Masjid Raya adalah Masjid yang berada di Ibu kota Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tingkat Provinsi. Tidak semua masjid yang berada di Ibu Kota Provinsi dapat disebut sebagai *Masjid Raya*. Untuk dapat ditetapkan sebagai *Masjid Raya*, sebuah masjid harus memiliki beberapa kriteria dan persyaratan tertentu.

Berikut adalah kriteria dan masjid yang dapat ditetapkan sebagai *Masjid Raya* berdasarkan *Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Islam No. DJ.II/802 Tahun 2014*:

- a) Dibiayai oleh pemerintah Provinsi melalui APBD dan dana masyarakat.
- b) Kepengurusannya ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi.
- c) Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, penginapan, perpustakaan dan sekolah atau yayasan pendidikan.
- d) Sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntabel.

- e) Memiliki minimal 1 Imam Besar, 5 orang Imam rawatib, dan 3 orang Muadzin yang ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Kementerian Agama Provinsi.
- f) Memiliki sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Provinsi.
- g) Status tanah bersertifikat tanah wakaf.

Selain harus memenuhi kriteria dan persyaratan diatas, untuk bisa ditetapkan sebagai Masjid Raya, sebuah masjid harus memiliki fasilitas-fasilitas utama dan fasilitas pendukung sebagai berikut:

- a) Memiliki ruang sholat yang mampu menampung 10.000 jamaah, lengkap dengan garis shaf.
- b) Menyediakan alat sholat wanita (mukenah) minimal 100 unit beserta ruang penyimpanannya.
- c) Memiliki minimal 2 ruang tamu khusus (VIP).
- d) Memiliki ruang serbaguna (aula) dengan kapasitas minimal 500 tempat duduk.
- e) Memiliki tempat wudhu yang terpisah untuk pria dan wanita sebanyak 300 kran, toilet sebanyak 150 unit dan MCK sebanyak 100 unit yang terjamin kebersihannya.
- f) Memiliki sound sistem dengan kapasitas 10.0000 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus.
- g) Memiliki sarana untuk penyandang difabilitas.

2. Masjid Agung

Sedangkan pengertian Masjid Agung yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Islam No. DJ.II/802 Tahun 2014, adalah sebuah masjid yang terletak di ibu kota pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota dan penetapannya dilakukan oleh Bupati/walikota atas rekomendasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Sama halnya dengan Masjid Raya, sebuah masjid harus memenuhi kriteria dan

persyaratan-persyaratan agar dapat ditetapkan sebagai Masjid Agung. Kriteria dan persyaratannya adalah:

- a) Dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan swadaya masyarakat muslim dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- b) Kepengurusan masjid ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- c) Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- d) Memiliki minimal 1 imam besar, 3 orang imam rawatib, dan 2 orang Muadzin yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- e) Melakukan rapat pleno minimal 1 kali setahun.
- f) Bangunan berada di dekat Alun-alun Kabupaten/Kota.

Adapun fasilitas yang harus dimiliki Masjid Agung adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki ruang sholat yang mampu menampung 8.000 jamaah lengkap dengan garis shaf.
- b) Menyediakan alat sholat wanita (mukenah) bersih minimal 50 unit serta tempat penyimpanannya.
- c) Memiliki 2 ruang tamu khusus (VIP).
- d) Memiliki ruang serbaguna (aula) dengan kapasitas 300 tempat duduk.
- e) Memiliki tempat wudhu terpisah untuk pria dan wanita dan minimal memiliki kran sebanyak 100 kran, toilet minimal 40 unit, dan MCK minimal 130 unit yang terjamin kebersihannya serta mudah dijangkau oleh Jamaah dan Imam.
- f) Memiliki sound sistem dengan kapasitas 5.000 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus.

3. Masjid Besar

Masjid besar adalah masjid yang berada di Kecamatan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tingkat Kecamatan atas rekomendasi Kepala KUA kecamatan.

Penetapan sebuah masjid menjadi Masjid Besar dipertimbangkan berdasarkan beberapa kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- a) Dibiayai atau disubsidi oleh pemerintah kecamatan atau organisasi kemasyarakatan dan yayasan.
- b) Menjadi pusat kegiatan keagamaan pemerintahan kecamatan.
- c) Menjadi Pembina masjid-masjid yang ada di wilayah kecamatan.
- d) Kepengurusan masjid dipilih oleh masyarakat dan dikuatkan oleh Camat atas usul KUA Kecamatan.
- e) Memiliki minimal 1 imam besar, 2 Imam Rawatib, dan 2 Muadzin yang ditetapkan oleh Camat Camat atas usul KUA Kecamatan.
- f) Memiliki sertifikat arah kiblat.

Fasilitas utama yang harus dimiliki oleh Masjid Besar ialah:

- a) Memiliki ruang sholat yang mampu menampung 5.000 jamaah lengkap dengan garis shaf.
- b) Menyediakan alat sholat wanita (mukenah) bersih minimal 30 unit serta tempat penyimpanannya.
- c) Memiliki 1 ruang tamu khusus (VIP).
- d) Memiliki ruang serbaguna (aula).
- e) Memiliki tempat wudhu terpisah untuk pria dan wanita dan minimal memiliki kran sebanyak 50 kran, MCK minimal 20 unit, yang terjamin kebersihannya serta mudah dijangkau oleh Jamaah dan Imam.
- f) Memiliki sound sistem dengan kapasitas 5.000 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus.

4. Masjid Jami'

Masjid yang terakhir adalah Masjid Jami'. Masjid Jami' adalah masjid yang berada di tingkat pemerintahan paling bawah yaitu pemerintahan tingkat kelurahan/Desa. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) no. 394 tahun 2004, yang menyebutkan bahwa Masjid Jami' ialah Masjid yang terletak di pusat

pemukiman wilayah Pedesaan/Kelurahan. Meskipun berada di wilayah Pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan, sebuah masjid tetaplah harus memiliki kriteria dan persyaratan yang menjadikannya ditetapkan dengan status Masjid Jami'.

Kriteria dan persyaratannya adalah:

- a) Berada di pusat Pedesaan/Kelurahan/Pemukiman warga dan dibiayai oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan atau swadaya masyarakat.
- b) Menjadi pusat kegiatan keagamaan pemerintah desa/kelurahan dan warga.
- c) Kepengurusan masjid dipilih dan ditetapkan oleh Pemerintah tingkat Kelurahan/Desa.

Sama halnya dengan masjid-masjid yang berada pada tingkatan atasnya. Masjid Jami' juga harus memiliki fasilitas utama yang wajib dipenuhi, yaitu:

- a) Memiliki ruang sholat yang mampu menampung hingga 1.000 jamaah, lengkap dengan garis shaf nya.
- b) Menyediakan alat sholat wanita (mukenah) bersih minimal 10 unit serta tempat penyimpanannya.
- c) Memiliki 1 ruang tamu.
- d) Memiliki ruang serbaguna (aula).
- e) Memiliki tempat wudhu terpisah untuk pria dan wanita dan minimal memiliki kran sebanyak 20 kran, MCK minimal 5 unit, yang terjamin kebersihannya serta mudah dijangkau oleh Jamaah dan Imam.
- f) Memiliki sound sistem yang memadai dan telah diakustik.
- g) Memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset.

itulah tadi penjelasan tentang perbedaan Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, dan Masjid jami' berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) no. 394 tahun 2004 dan Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Islam No. DJ.II/802 Tahun 2014. Secara garis besar dapat disimpulkan perbedaan Masjid-masjid tersebut terdapat pada letak wilayah pemerintahannya.

Masjid Raya adalah Masjid yang berada di wilayah provinsi dan ditetapkan oleh pemerintah Provinsi, Masjid Agung adalah Masjid yang berada di wilayah pemerintahan Kabupaten, Masjid Besar adalah Masjid yang berada di wilayah Kecamatan, dan Masjid Jami' adalah masjid yang berada di wilayah pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan.

2.1.3 Pengertian Organisasi Nonlaba (Nirlaba)

Menurut Janis & Budiarmo (2017:103) pengertian organisasi non laba (nirlaba) berasal dari kata organisasi dan nonlaba. Organisasi berasal dari bahasa Yunani "organ" yang memiliki arti "alat. Sedangkan pengertian umum, organisasi merupakan alat atau wadah sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Torang (2017:25) organisasi adalah sistem yang berperan membantu aliran aktivitas dan proses (pola hubungan kerja) yang melibatkan satu atau beberapa orang sebagai pelaksana tugas yang dibuat untuk memenuhi tujuan bersama. Organisasi merupakan sebuah entitas sosial yang terorganisir secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki batasan yang relatif mudah di pahami, organisasi juga berfungsi secara berkesinambungan dalam memenuhi beberapa sasaran bersama.

Jadi, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan wadah yang berisikan sekumpulan orang yang saling bekerja sama secara tersusun untuk memenuhi tujuan atau sasaran yang telah ditentukan bersama. Dalam hal ini, perencanaan sangat penting bagi sebuah organisasi, karena dengan adanya perencanaan dapat mengantisipasi jika ada kendala ataupun semacamnya sehingga dapat teratasi. Bagi setiap jenis organisasi, memiliki sistem perencanaan yang berbeda-beda tergantung perubahan kestabilan lingkungan yang mempengaruhinya. Semakin tinggi perubahan kestabilan maka dibutuhkan sistem perencanaan yang semakin baik dan canggih.

Menurut Janis & Budiarmo (2017:103) pengertian nonlaba yaitu istilah atau kata lain yang biasa dipakai sebagai sesuatu yang bertujuan sosial, kemasyarakatan ataupun lingkungan yang di mana tidak mencari sebuah keuntungan materi.

Entitas (organisasi) nonlaba sendiri mempunyai arti organisasi yang bisa dimiliki pemerintah bahkan bisa dimiliki sektor swasta yang mempunyai tujuan tidak untuk mencari keuntungan. Entitas nonlaba mendapatkan sumber daya atau dana dari sumbangan para anggota serta para penyumbang lainnya yang tidak mengharapkan timbal balik dari apa yang telah mereka berikan (ISAK 35, 2018).

Menurut Safitri *et al.*, (2021) organisasi nonlaba merupakan suatu lembaga yang berisikan sekelompok individu yang memiliki tujuan tertentu saling bekerjasama untuk mencapai tujuan tersebut serta tidak berfikir akan keuntungan atau kekayaan. Organisasi nonlaba meliputi masjid, sekolah negeri, derma politik, rumah sakit serta klinik publik, organisasi politik, asosiasi profesional, yayasan, institute riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah.

Organisasi nonlaba mendapatkan sumber daya manusia sebagai aset yang paling berharga, karena semua kegiatan organisasi ini merupakan dari atau oleh serta untuk manusia. Pendirian organisasi nonlaba dalam melakukan kegiatannya tidak dipengaruhi oleh keuntungan (laba). Karena seluruh kegiatan tidak diperuntukan untuk mengambil keuntungan (laba), akan tetapi dalam perjalanannya organisasi nonlaba bisa mendapatkan keuntungan dari kinerja keuangan yang baik yang biasa dikenal dengan surplus akibat aliran kas masuk lebih besar dari aliran kas keluar. Surplus diperoleh untuk memperbesar skala kegiatan kemakmuran serta memperbaiki sarana dan prasarana yang telah rusak (Rahayu, 2019:37-38). Dengan sasaran utama untuk suatu tujuan yang tidak mencari keuntungan, transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam organisasi nonlaba (Lastiva & Muslimin, 2020:64).

Regulasi tentang organisasi nonlaba (nirlaba) di Indonesia terdapat pada beberapa peraturan di antara lain : Undang-undang RI no. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian dirubah menjadi UU RI no. 28 tentang perubahan atas UU

RI no. 16 tentang Yayasan, dan juga undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Sejalan dengan tujuan sosialnya organisasi nonlaba seringkali mengumpulkan dana dari masyarakat untuk selanjutnya dikelola untuk kepentingan masyarakat luas. Karena terdapat kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat tersebut, perlu adanya penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel kepada masyarakat luas. Untuk keperluan akuntabilitas dana organisasi nonlaba juga menyediakan instrumen penyusunan laporan keuangan yang berstandar (Andriani *et al.*, 2018:92).

2.1.3.1 Tujuan Organisasi Nonlaba (Nirlaba)

Menurut Rahayu (2019:39-40) Tujuan organisasi nonlaba memiliki hubungan erat dengan kepentingan masyarakat umum serta tidak mengutamakan mencari keuntungan (laba) dalam menjalankan kegiatannya. Dimana tujuan utama dari organisasi nonlaba yaitu pendidikan, pelayanan sosial, perlindungan politik serta rekreasi. Tujuan seperti ini dipengaruhi dengan jenis atau bidang yang dijalankan oleh masing-masing organisasi.

Tujuan organisasi nirlaba yaitu untuk melayani publik untuk mengakses tempat umum yang diperuntukkan untuk publik (Marlinah & Ibrahim, 2018).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan organisasi nonlaba adalah memenuhi serta melayani dengan baik masyarakat sesuai dengan kebutuhan, tanpa memikirkan imbalan akan apa yang telah dilakukan ataupun dikeluarkan dengan kata lain ikhlas melakukannya tanpa mencari keuntungan.

2.1.3.2 Karakteristik Organisasi Nonlaba (Nirlaba)

Menurut Octisari *et al.*, (2021) karekteristik organisasi nonlaba tidak selaras dengan organisasi yang mencari keuntungan (laba). Perbedaannya terletak di perolehan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitasnya.

Menurut Marlinah & Ibrahim, (2018) karakteristik organisasi nonlaba antara lain, yaitu :

1. Sumber daya entitas didapatkan dari para penyumbang dengan tidak mengharapkan timbal balik atas manfaat ekonomi yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang telah diberikan.
2. Menghasilkan barang ataupun jasa dengan tujuan tidak untuk menimbun keuntungan (laba), maka jumlahnya tidak pernah dibagikan untuk para pendiri maupun pemilik entitas terkait.
3. Tidak adanya kepemilikan seperti organisasi bisnis. Organisasi nonlaba merupakan milik publik. Dengan kata lain kepemilikan organisasi nonlaba tidak bisa diperjual belikan bahkan dialihkan baik itu kepada pemerintahan ataupun kepada organisasi lainnya.

2.1.4 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Widhawati *et al.*, (2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pemberian sumber daya yang dilakukan oleh masyarakat, dilakukan dengan cara menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan semua kegiatan yang telah dilakukan yang merupakan tanggung jawab penerima kepada pemberi sumber daya, karena mereka berhak dan berwenang untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Akuntabilitas terbagi dua yaitu :

1. Akuntabilitas vertikal

Pengertian Akuntabilitas vertikal merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada tuhan.

2. Akuntabilitas horizontal

Pengertian akuntabilitas horizontal merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban karena adanya hubungan organisasi dengan masyarakat ataupun lingkungan sekitar yang merupakan stakeholders. Ada beberapa indikator minimum akuntabilitas di antara lain :

- Terdapat keselarasan antara implementasi dengan standar prosedur pelaksanaan dalam proses kegiatan.
- menghasilkan manfaat (dampak) atau hasil yang terukur (BPKAD, 2017).

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk memenuhi tujuan dan sasaran bersama melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. Akuntabilitas juga digunakan untuk mengukur seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan telah sesuai dengan kepentingan stakeholder (Haryanti & Muhammad, 2019).

2.1.4.1 Prinsip Akuntabilitas

Menurut (Nafidah lina & Anisa, 2017) prinsip akuntabilitas merupakan salah satu syarat dalam menentukan akuntabilitas. Akuntabilitas yang diterapkan dengan benar berarti bahwa prinsip-prinsip ini diikuti dengan benar. Berikut adalah beberapa prinsip akuntabilitas yang perlu Anda ketahui, yaitu :

- a) Prinsip akuntabilitas yang pertama adalah komitmen manajemen dan seluruh karyawan untuk memimpin organisasi dengan nilai yang bertanggung jawab.
- b) Akuntabilitas adalah sistem yang memastikan penggunaan sumber daya secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan yang ditetapkan.
- d) Akuntabilitas didorong oleh visi, misi, hasil, dan kepentingan yang dicapai organisasi.
- e) Mendukung nilai-nilai kejujuran, transparansi, objektivitas dan inovasi.

2.1.4.2 Fungsi Akuntabilitas

Menurut Bowen, prinsip akuntabilitas memiliki 3 fungsi penting, yaitu:

1. Berfungsi sebagai alat pemantauan

Alat pemantau di sini berarti akuntabilitas sebagai cara untuk memantau tugas atau kewajiban yang telah dilakukan seseorang dan meminta pertanggungjawaban atasannya. Akuntabilitas juga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan tugas yang dilakukan dalam evaluasi pekerjaan. Suatu pesanan dianggap berhasil jika dapat diselesaikan dengan benar dan ditagih dengan benar.

2. Tempat Membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Fitur

Fungsi akuntabilitas selanjutnya adalah membuat kinerja menjadi lebih efektif dan efisien. Akuntabilitas membuat semua aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan menjadi lebih efektif. Penilaian yang teratur dan berkelanjutan harus membuatnya lebih efisien.

3. Membantu mencegah penyalahgunaan kantor

Fungsi ini adalah fitur akuntabilitas yang sangat penting. Anda tahu bahwa penyalahgunaan pekerjaan, yang merupakan contoh korupsi, dapat terjadi dalam bisnis Anda.

Konsep akuntabilitas ini meminimalkan kemungkinan penyimpangan dari pekerjaan atau posisi. Berkaitan dengan akuntabilitas, Anda memerlukan laporan pertanggungjawaban yang akurat dan disiapkan secara akurat untuk menghindari tanda-tanda korupsi atau potensi korupsi dalam bisnis atau perusahaan Anda.

2.1.5 Pengertian Transparansi

Menurut Widhawati *et al.*, (2021) transparansi merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan pengelola dalam melaksanakan prinsip keterbukaan proses

pengambilan keputusan serta penyampaian informasi. Keterbukaan dalam arti bahwa informasi yang akan disampaikan sesuai, harus benar (*real*), lengkap serta detail dan tepat waktu kepada para stakeholders terkait. Prinsip transparansi yang tercantum dalam penelitian Julkarinain (2018), antara lain:

1. Terdapat informasi yang mudah dimengerti dan diakses oleh masyarakat (sumber dana, pelaksanaan kegiatan, bentuk bantuan).
2. Terdapat publikasi media terkait kegiatan-kegiatan serta detail pembiayaan atau keuangan kegiatan, terdapat laporan keuangan secara berkala mengenai pengelolaan sumber dana pada kegiatan yang sudah ataupun sedang berlangsung.
3. Terdapat laporan tahunan yang dibuat oleh organisasi, website atau media publikasi dalam organisasi.
4. Aturan atau pedoman dalam hal penyebarluasan informasi.

2.1.6 Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK No. 35)

ISAK 35 merupakan turunan dari PSAK 1. ISAK 35 berisikan tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba memberikan pedoman mengenai penyajian dalam laporan keuangan untuk entitas nonlaba. Manfaat pedoman ISAK 35 yaitu memberikan informasi keuangan dengan jelas kepada donator dan masyarakat.

Menurut DSAK melihat pernyataan yang mengatur mengenai penyajian laporan keuangan yang berbeda walaupun kelompok standar yang sama akan menimbulkan inkonsistensi pengaturan serta ketidakjelasan tentang batasan ruang lingkup antara PSAK 1 dengan PSAK 45. Dimana ruang lingkup PSAK 45 berlaku untuk entitas atau organisasi yang berorientasi nonlaba, sedangkan ruang lingkup PSAK 1 berlaku untuk entitas atau organisasi laba dan nonlaba (Mustakin *et al.*, 2021).

Menurut Widhawati *et al.*, (2021) terdapat lima laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba menurut ISAK 35, kelima unsur tersebut antara lain : Laporan

Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.6.1 Unsur-Unsur ISAK No. 35

1. Laporan Posisi Keuangan

Dalam Laporan Posisi Keuangan adalah Laporan yang menjelaskan mengenai posisi aset, liabilitas dan aset bersih pada waktu tertentu.

2. Laporan penghasilan komprehensif

Laporan penghasilan komprehensif merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai laporan laba rugi untuk suatu periode tertentu di mana laporan tersebut merupakan hasil kinerja keuangan entitas selama periode tertentu.

3. Laporan perubahan aset neto

Laporan aset neto merupakan laporan yang di dalam menyajikan informasi mengenai aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya serta aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya.

4. Laporan arus kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang berisi tentang pengeluaran dan penerimaan kas serta juga setara kas selama periode tertentu yang sudah di kelompokkan di dalam aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

5. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan suatu bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari laporan-laporan keuangan yang ada di atas. Karena memiliki tujuan dapat memberikan informasi tambahan akan hal-hal yang sudah dinyatakan dalam laporan keuangan di atas.

Mengenai format setiap laporan keuangan entitas nonlaba berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalamnya. Entitas dapat menentukan apakah entitasnya merupakan suatu entitas nonlaba sehingga entitas dapat menerapkan interpretasi tersebut.

2.1.6.2 Faktor Penghambat Penerapan ISAK 35

Dimana dalam penerapan standar akuntansi selalu memiliki rintangan dan hambatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk dalam penerapan ISAK 35 atau Standar akuntansi yang mengatur mengenai laporan keuangan perusahaan nirlaba (nonlaba). Di Masjid maupun organisasi nonlaba lainnya pasti memiliki hambatan yang dimana hambatan tersebut terjadi karena situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan organisasi nonlaba termasuk.

Beberapa faktor penghambat penerapan ISAK 35 menurut (Mustakin *et al.*, 2021) di antara lain :

1. Lemahnya Sumber Daya Manusia Dalam Ilmu Akuntansi

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga menjadi kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir serta perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi itu. Perkembangan terbaru memandang karyawan bukan sebagai sumber daya saja, tetapi lebih kepada modal atau aset bagi institusi ataupun organisasi (Susan, 2019). Ketika membuat laporan keuangan masjid biasanya dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten serta memiliki pengetahuan mengenai ilmu akuntansi. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan nantinya.

2. Kendala pemahaman Terkait ISAK 35

Sebelumnya organisasi nonlaba sering disebut organisasi nirlaba, sebutan itu mengalami perubahan pada tahun 2020 yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) yang melihat menggunakan kata not for profit (nirlaba) tidak semata-mata menunjukkan bentuk negative atau lawan dari profit activities, sehingga penggunaan kata nir (yang berarti tidak atau bukan) dinilai kurang tepat, sehingga diganti dengan kata yang tepat adalah nonlaba. Pencambutan PSAK 45 dan diterapkannya ISAK 35 ini bertujuan untuk mempermudah pelaku organisasi nonlaba untuk membuat laporan keuangan organisasinya. ISAK 35 baru diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2020 lalu. Sehingga dapat dikatakan bahwa standar ini merupakan standar baru yang berlaku di Indonesia. Karena ISAK 35 masih terbilang baru, sehingga dalam mensosialisasi ataupun mengedukasi kepada pelaku organisasi nonlaba tentang ISAK belum maksimal (IAI 2019).

3. Keterbatasan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan

Keterbatasan waktu pada BKM atau bendahara organisasi atau entitas nonlaba ini menjadi salah satu penghambat pengurus organisasi atau entitas nonlaba dalam penyusunan laporan keuangan ISAK 35, dimana Pengurus organisasi atau entitas nonlaba kebanyakan memiliki pekerjaan lain selain menjadi pengurus masjid. Karena terbatasnya waktu bagi pengurus masjid sehingga cukup susah membagi waktu antara belajar tentang penyusunan laporan keuangan atau dengan pekerjaannya.

4. Budaya

Menurut Manullang, (2008) Pengujian empirik menggunakan Model Hofstede-Gray dalam perkembangannya, sudah banyak peneliti yang mengkonfirmasi model Hofstede-Gray tersebut diatas. Peneliti-peneliti ini menegaskan bahwa budaya membawa pengaruh pada sistem akuntansi suatu negara. Masing-masing peneliti dan pendapat mereka dapat diuraikan sebagai berikut:

- I. MBH Perera (1989), menjelaskan bahwa budaya merupakan salah satu faktor lingkungan yang paling berpengaruh terhadap sistem akuntansi di suatu negara.
- II. Bloom dan Naciri (1989), mengemukakan hasil penelitiannya bahwa penetapan standar akuntansi di suatu negara merupakan fungsi dari ekonomi, politik, dan lingkungan sosial (budaya) dari negara tersebut.
- III. Eddie (1990) menganalisis korelasi antara indeks dari accounting value Gray, dengan dimensi budaya Hofstede dari 13 negara di Asia-Pacific. Walaupun menunjukkan korelasi, namun karena metode statistik yang kurang dapat diandalkan, hasilnya tidak banyak dijadikan referensi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Widhawati *et al.*, (2021) dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi sebagai implementasi ISAK 35 pada laporan keuangan Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri. Di dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa masjid tidak memiliki pedoman dalam membuat pelaporan keuangan dan pedoman pelaksanaan kegiatan organisasi (*SOP/Standart Operation Prosedure*) serta belum menyajikan informasi dengan lengkap dan belum memiliki website resmi sebagai media informasi (publikasi). Terkait dengan laporan keuangan pengurus masjid belum mengetahui dan memahami ISAK 35 sebagai pedoman pelaporan entitas nonlaba, sehingga laporan keuangan masih sederhana.

Safitri *et al.*, (2021) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan pada TPQ Al-Barokah Pekalongan sesuai dengan ISAK 35. Dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi pada TPQ Al-Barokah. Di mana data yang diperoleh merupakan data primer yang didapatkan melalui wawancara. Dengan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa

dasar pencatatan yang diterapkan di TPQ Al-Barokah menggunakan basis akrual di mana pencatatan transaksi atau kejadian keuangan diakui ketika terjadi atau pada saat perolehan. Siklus akuntansi nya belum lengkap serta tidak berurutan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang seharusnya dibuat menurut ISAK 35 yaitu: laporan posisi keuangan, laporan komperhensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Penelitian yang telah dilakukan Diviana *et al.*, (2020) penelitian ini bertujuan untuk menyusun laporan keuangan Masjid Baitul Haadi sesuai dengan ISAK 35 dengan bantuan aplikasi *microsoft Excel*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Di mana data di dapatkan melalui serangkaian wawancara serta observasi. Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa Masjid Baitul Haadi hanya menyajikan laporan keuangan sebatas laporan kas masuk dan kas keluar saja. Jadi, sama sekali tidak menerapkan sesuai dengan ISAK 35 melainkan hanya laporan sederhana saja.

Haryanti & Muhammad, (2019) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan laporan keuangan kabupaten wonosobo. Serta menganalisis transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan masjid di kabupaten wonosobo. Dimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Data yang digunakan di peroleh dari 37 masjid yang sudah melakukan pembukuan laporan keuangan serta tercatat di kementrian agama (KEMENAG) di kabupaten wonosobo. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara spesifik bagaimana proses laporan keuangan, transparansi dan akuntabilitas masjid yang berada di kabupaten wonosobo, sehingga dapat digunakan sebagai informasi masyarakat terkait tingkat transparansi dan akuntabel di kabupaten wonosobo.

Penelitian yang dilakukan Dwikasmanto, (2020) penelitian dilakukan untuk mengetahui analisis laporan keuangan Masjid Nurul Iman Al Hidayah desa Barumanis sesuai dengan standar laporan keuangan organisasi nirlaba yang telah di atur dalam ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas atau organisasi berorientasi nonlaba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif, penelitian

ini menggunakan data sekunder, dimana data tersebut didapat dari pihak-pihak atau pengurus agama Masjid Nurul Iman Al-Hidayah mengenai laporan keuangan masjid. Dimana hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan Masjid Nurul Iman Al-Hidayah Desa Barumanis belum membuat laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba.

Mustakin *et al.*, (2021) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor penghambat penerapan ISAK 35 pada laporan keuangan yang ada di Masjid AL-IHSAN. Pada penelitian tersebut menggunakan metode penelitian metode Kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer hasil wawancara dengan informan dan juga Laporan keuangan. Sedangkan data sekunder didapatkan dari buku, jurnal dan lain-lainnya. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, Wawancara dan dokumentasi. Adapun informan kunci pada penelitian ini adalah Bendahara Masjid AL-IHSAN dan ketua Masjid AL-IHSAN. Alat Analisis menggunakan Standar akuntansi ISAK 35, sedangkan Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Masjid AL-IHSAN belum Menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku yaitu Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35. Karena laporan keuangan yang dibuat masih sederhana yakni penerimaan dan pengeluaran kas. Pengurus Masjid AL-IHSAN memiliki beberapa hambatan dalam penyusunan laporan keuangan ISAK 35 yaitu Lemahnya Sumber Daya Manusia dalam ilmu akuntansi, Kendala pemahaman ISAK 35, serta keterbatasan waktu dalam penyusunan laporan keuangan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Octisari *et al.*, (2021) dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas serta kesesuaian pelaporan keuangan pada lembaga Masjid di wilayah kecamatan Kedungbanteng dengan ISAK 35. Penelitian ini menggunakan 14 sampel Masjid yang berada di wilayah Kecamatan Kedungbanteng. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa takmir (pengurus) masjid

di wilayah tersebut sudah mengelola keuangan Masjid secara akuntabel sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pencatatan dilakukan dengan baik tetapi masih secara sederhana. Mengenai interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 pengurus masjid belum melakukan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi tersebut. Belum diterapkan standar tersebut dikarenakan standar tersebut diakui belum diketahui atau dipelajari pada pengurus Masjid.

Dinanti & Ginanjar, (2018) melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat seberapa jauh penerapan pelaporan keuangan sekolah sesuai dengan PSAK NO.45. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah *experiment*) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara snowball sampling. Snowball ini merupakan teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data belum mampu memberikan data yang lengkap dan pasti maka mencari sampel lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan natural setting atau yang disebut juga dengan kondisi yang alamiah. Metode alamiah atau kondisi alamiah ini dilakukan dalam sebuah pertemuan rutin anggota KKG Gugus RA Kartini. Metode pengumpulan data dilakukan dalam kondisi yang alamiah dengan menggunakan sumber data primer serta teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi pada sekolah-sekolah TK anggota KKG Gugus RA Kartini.

Hidayatullah *et al.*, (2019) melakukan penelitian bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis penerapan laporan keuangan yang ada pada Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi serta merekonstruksi laporan keuangan Masjid sesuai dengan PSAK 109 dan PSAK 45. Dimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis primer dan sekunder yang diambil dari objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer yaitu melalui wawancara langsung kepada pengurus/ pengelola masjid atau yang biasa disebut ta'mir masjid dan juga bendahara masjid dan

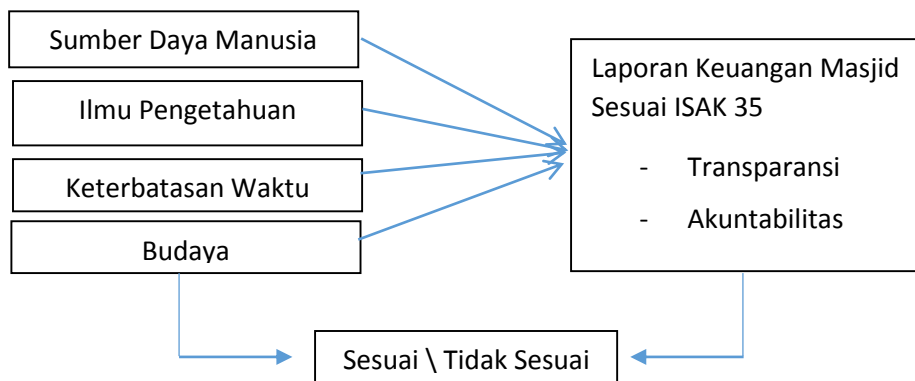
untuk data sekunder diperoleh dari laporan keuangan yang terdapat di Masjid Agung Baiturrahman tahun 2016.

Sarif *et al.*, (2015) Penelitian ini membahas tentang pengelolaan masjid Tabung Masjid diatur oleh hukum administrasi agama negara. Pendekatan konvensional membutuhkan kepatuhan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana untuk Tabung Masjid akan tetap menjadi ide hanya jika tidak beroperasi dengan metode kontemporer. Studi ini berpendapat bahwa pendekatan kepatuhan diperlukan di tingkat operasi tetapi tidak di tingkat perusahaan. Metode studi kasus di beberapa masjid terpilih menemukan bahwa komite keuangan tidak punya pilihan selain mematuhi peraturan. Sementara itu, perlu digunakan cara yang inovatif melalui penggalangan dana khusus untuk mengatasi masalah sosial. Studi ini merekomendasikan pengumpulan dan pengelolaan Tabung Masjid untuk digunakan sebagai cara kreatif untuk meningkatkan nilai dana dalam semangat kepatuhan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan masjid-masjid terpilih di Malaysia untuk mengeksplorasi konsep pengelolaan Tabung Masjid berdasarkan *Maqāṣid alSharī'ah* dari perspektif pelaporan keuangan. Studi ini mengajukan dua pertanyaan penting, yaitu (a) sumber pembiayaan, dan (b) pengelolaan dana.

Iqmal *et al.*, (2018) Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak praktik pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan pada organisasi nonlaba Islam (NPO) di Malaysia. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode studi kasus eksplanatori untuk menganalisis intervensi peristiwa kehidupan yang membentuk praktik pengendalian internal. Untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan wawancara studi kasus yang lebih pendek dengan pertanyaan protokol wawancara yang dikembangkan dari tinjauan pustaka. Untuk pelaporan, penelitian ini mengadopsi format studi kasus ganda yang menggabungkan ketiga kasus menjadi satu laporan. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan salah satu dari sedikit penelitian yang mengkaji praktik pengendalian internal terutama dampaknya terhadap akuntabilitas keuangan NPO Islam di Malaysia.

Kismawadi *et al.*, (2018) Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pertanggungjawaban keuangan, dan sebagai bahan evaluasi pengelolaan masjid secara keseluruhan dengan metode Studi Kasus. Penelitian ini dilakukan di masjid terbesar di provinsi Jawa Timur, masjid ini dijadikan sebagai tempat penelitian karena dapat mencerminkan masjid-masjid yang ada di provinsi ini. Informan dalam peneliti ini adalah manajer yang terkait dengan pelaporan keuangan dan masyarakat umum. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif studi kasus. Penelitian ini mengumpulkan data melalui penelitian lapangan, observasi bebas dan terstruktur, penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh pengelola masjid sudah sangat baik, bahan evaluasi yang masih harus dilakukan adalah selalu mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat, sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan oleh pengelola masjid kepada semua pihak.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual